

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan sarana untuk menyampaikan informasi keuangan dari suatu perusahaan kepada pihak – pihak luar yang berkepentingan. Laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan berupa neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas dan laporan ekuitas pemilik atau pemegang saham (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2008, hlmn 2). Dimana menurut Kieso et al. (2008, hlmn 190) melalui neraca perusahaan menyediakan informasi yang digunakan untuk menilai risiko perusahaan serta memprediksi masa depan serta untuk menganalisis likuiditas dan solvensi keuangan perusahaan. Laporan keuangan perusahaan sangat berguna bagi investor dan kreditor dalam membuat keputusan mengenai modal yang akan dipinjamkan atau yang akan ditanamkan pada perusahaan tersebut.

Seiring dengan perkembangan zaman, tuntutan globalisasi membawa perubahan signifikan khususnya dalam dunia bisnis, dimana mengizinkan seorang pelaku bisnis melakukan bisnis lintas negara. Namun, keberagaman standar akuntansi dari setiap negara menyebabkan penyusunan, pelaporan dan interpretasi dari laporan keuangan menimbulkan masalah. Padahal, laporan keuangan adalah sumber informasi yang utama untuk mengetahui kinerja dari perusahaan tersebut. Maka, *Internasional Accounting Standard Board* (IASB) mengeluarkan *International Financial Reporting Standards* (IFRS) kumpulan standar pelaporan keuangan yang dapat diterima secara mendunia.

Pengadopsian IFRS kedalam standar akuntansi domestik sendiri dilakukan guna menghasilkan laporan keuangan dengan kredibilitas yang tinggi, laporan keuangan menghasilkan nilai yang lebih relevan dan akurat, laporan keuangan dapat dibandingkan (komparable) serta menghasilkan informasi yang terkini mengenai aktiva, hutang, ekuitas, pendapatan dan beban perusahaan (Suyatmini & Sheilla, 2014).

Bersamaan dengan perkembangan dalam dunia bisnis, pada tahun 2007 Indonesia mengadopsi IFRS kedalam standar akuntansi domestik yaitu SAK. Berdasarkan

konvergensi IFRS, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengeluarkan PSAK 16 (revisi 2007) menggantikan PSAK (revisi 1994) mengenai aset tetap yang berlaku mulai 1 Januari 2008. Menurut Putra (2013) aset tetap merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam menjalankan operasional perusahaan dan mempunyai nilai yang tinggi di dalam neraca. Aset tetap adalah harta yang digunakan dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan, harta tersebut berwujud dan mempunyai manfaat ekonomis lebih dari satu tahun.

Pada pengakuan awalnya, aset tetap dicatat berdasarkan nilai perolehannya. Hal tersebut, diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16 Revisi 2014 Suatu aset tetap yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset pada awalnya harus diukur sebesar biaya perolehan. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2014) biaya perolehan dari aset tetap terdiri dari harga beli barang tersebut, bea impor dan pajak pembelian, dan biaya lainnya yang digunakan untuk membawa aset tersebut hingga dapat dipergunakan.

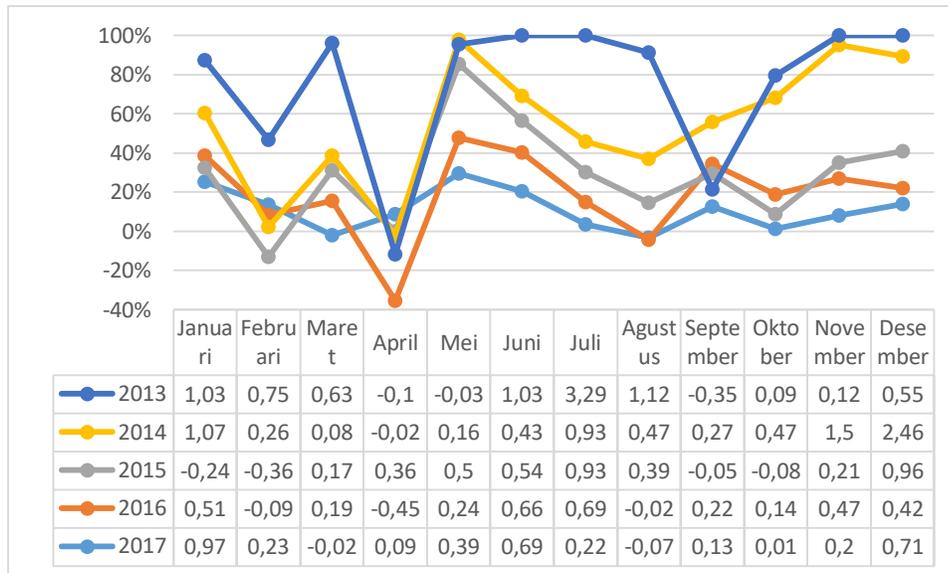
Perbedaan mendasar yang membedakan PSAK 16 (revisi 2007) dengan PSAK 16 (revisi 1994) terletak pada kebebasan perusahaan dalam pemilihan metode pengukuran setelah pengakuan awal aset tetap. Untuk melakukan pengukuran setelah pengakuan awal, perusahaan dapat memilih apakah akan menggunakan model biaya atau model revaluasi dan menerapkannya pada seluruh aset tetap pada kelompok yang sama (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2014). Sebelum dilakukanya konvergensi SAK terhadap IFRS, pengukuran aset tetap setelah pengakuan awal hanya dapat diukur menggunakan model biaya (PSAK 16: Aset Tetap, revisi 1994). Namun, pencatatan dengan menggunakan harga perolehan membuat nilai aset tetap dinilai tidak relevan karena nilai tersebut tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya pada saat ini (Latifa & Haridhi, 2016). Hal tersebut benar adanya jika dilihat dari sisi perubahan nilai rupiah, nilai riil dari aset tetap tersebut dapat berubah seiring dengan perkembangan nilai rupiah yang terus berubah di setiap tahunnya belum lagi tingkat inflasi yang terus

**Novi Fajrin Alifia, 2019**

*PENGARUH DEBT CONTRACT, POLITICAL COST DAN AKUISISI TERHADAP  
KEPUTUSAN REVALUASI ASET TETAP*

Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.upi.edu | Perpustakaan.upi.edu

berubah dapat berpengaruh terhadap naik turunnya nilai aset. Berikut merupakan grafik dari tingkat inflasi di Indonesia tahun 2013-2017.



Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah tahun 2019)

### Grafik 1.1 Tingkat Inflasi di Indonesia Tahun 2013-2017

Revaluasi Aset Tetap merupakan penilaian kembali atas nilai aset tetap suatu perusahaan guna menyajikan informasi nilai terkini dari aset yang dimiliki oleh perusahaan (Aryani & Juliarto, 2017). Apabila perusahaan menggunakan model revaluasi, setelah diakui sebagai Aset, pengukuran dilakukan yaitu dengan mengurangi nilai wajar pada tanggal revaluasi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Revaluasi harus dilakukan secara berkala untuk memastikan nilai tercatat tidak berbeda secara material dengan nilai wajar pada akhir periode pelaporan (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2014). Dalam model revaluasi laporan keuangan yang di buat oleh perusahaan cenderung lebih tepat untuk keperluan pengambilan keputusan, karena pengukuran aset tetap diukur berdasarkan nilai wajarnya (Firmansyah & Sherlita, 2012). Metode nilai wajar pada umumnya memberikan informasi yang relevan dan cenderung memberikan informasi yang berpandangan ke depan (Blecher, 2018). Oleh karena itu, benar adanya apabila model revaluasi cenderung menyajikan laporan keuangan yang lebih relevan untuk seorang manajer sebagai dasar pengambilan keputusan.

**Novi Fajrin Alifia, 2019**

*PENGARUH DEBT CONTRACT, POLITICAL COST DAN AKUISISI TERHADAP KEPUTUSAN REVALUASI ASET TETAP*

Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.upi.edu | Perpustakaan.upi.edu

Baik model biaya ataupun model revaluasi pastinya mempunyai kekurangan dan kelebihan. Adapun kekurangannya terletak pada pemilihan model revaluasi cenderung lebih mahal jika dibandingkan dengan pengukuran menggunakan model biaya, karena untuk mengukur nilai wajar suatu aset tetap membutuhkan jasa seorang penilai publik. Berbeda dengan pengukuran model biaya yang cenderung lebih murah karena tidak dibutuhkannya seorang penilai publik untuk mengukur nilai wajar dari aset tersebut (Martini & Kurniawati, 2018).

Hal tersebut didukung oleh pernyataan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) pada tahun 2015, karena sejak tahun 2015 OJK telah memperketat peraturan mengenai entitas bisnis di Indonesia untuk menggunakan model revaluasi dalam menilai kembali nilai wajar dari aset tetap suatu entitas tersebut. Hal tersebut didukung dengan pernyataan DSAK (Dewan Standar Akuntansi Keuangan) IAI yang telah mengeluarkan PSAK 16: Aset Tetap sejak terjadinya proses konvergensi IFRS (*International Financial Reporting Standard*). Namun, entitas tersebut cenderung tidak mau menggunakan model revaluasi dikarenakan enggan untuk membayar mahal biaya penilai publik. Meskipun menurut salah seorang akuntan publik Roy Iman Widjaya revaluasi aset tetap tidak harus menggunakan jasa penilai publik, tapi bisa juga menggunakan jasa dari pihak internal agar tidak mengeluarkan biaya. Asalkan, perusahaan tersebut nantinya akan diaudit oleh auditor yang independen (Swa Bussiness Research, dikutip 26 januari 2019).

Presiden RI Jokowi telah mendorong entitas bisnis di Indonesia baik itu perusahaan yang besar bahkan kecil untuk menggunakan model revaluasi aset. Karena, dengan menggunakan model revaluasi aset diharapkan dapat membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia (Liputan 6.com, 2016, dikutip 26 Januari 2019) Berbeda dengan entitas bisnis, berdasarkan dengan yang dikutip oleh (CNN Indonesia, dikutip 26 Januari 2019) pada tahun 2018 Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) sedang gencar – gencarnya melakukan revaluasi aset pada seluruh Barang Milik Negara (BMN). Tentu saja dalam melakukan revaluasi aset tetap biaya yang dikeluarkan hingga mencapai ratusan milyar. Namun, tentunya dengan melakukan revaluasi aset tetap memberikan banyak keuntungan, salah satunya pemerintah dapat mengetahui nilai terkini dari aset

**Novi Fajrin Alifia, 2019**

*PENGARUH DEBT CONTRACT, POLITICAL COST DAN AKUISISI TERHADAP KEPUTUSAN REVALUASI ASET TETAP*

Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.upi.edu | Perpustakaan.upi.edu

yang dimiliki. Nilai aset BMN sendiri telah mencapai Rp. 2.500 Triliun karena banyak aset yang awalnya hanya dinilai kecil namun nyatanya sudah bernilai ratusan juta.

Salah satu keuntungan dari revaluasi aset tetap terlihat jelas pada PT. PLN (Persero) yang hampir mengalami kebangkrutan kemudian melakukan revaluasi aset tetap. Rizal Ramli, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Sumber Daya mengatakan bahwa revaluasi aset tetap telah diimplementasikan 15 tahun yang lalu dan menyelamatkan PT. PLN (Persero) dari kebangkrutan. Aset PLN saat itu hanya sekitar Rp. 50 Triliun dan setelah dilakukan revaluasi asetnya bertambah menjadi Rp. 250 Triliun. (Liputan 6.com, dikutip 26 Januari 2019)

Revaluasi aset tetap sebenarnya tidak hanya menaikkan nilai pada aset tetap namun, revaluasi juga dapat menurunkan nilai pada aset tetap (Yulistia M, Fauziati, Minovia, & Khairati, 2015). Apabila setelah dilakukannya revaluasi nilai aset tetap mengalami kenaikan, maka keuntungan yang didapat dilaporkan kedalam bagian ekuitas dan tidak diakui sebagai *net income*. Sebaliknya apabila mengalami penurunan terhadap nilai aset tetap, maka kerugian langsung dilaporkan dalam laporan laba rugi komperhensif dan langsung menurunkan nilai *net income*. Belum lagi perusahaan takut akan implikasinya terhadap pajak atas revaluasi. Hal tersebut menjadi pertimbangan lain dari perusahaan untuk memilih model revaluasi dalam pengukuran nilai aset tetap (Martini & Kurniawati, 2018).

Sebelumnya pada Permenkeu Nomor 79/PMK.03/2008 perusahaan yang melakukan revaluasi aset tetap akan dikenakan pajak final 10%. Lalu, pada tahun 2015 pemerintah mengeluarkan Permenkeu Nomor 191/PMK/010/2015 bagi perusahaan yang melakukan revaluasi aset tetap dengan tujuan perpajakan pada tahun 2015 akan dikenakan pajak final sebesar 3% dan 4% untuk tahun 2016. Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut berdasarkan yang dikutip oleh (Kompas.com, dikutip 2 Februari 2019) banyak perusahaan BUMN yang memanfaatkan diskon pajak revaluasi. 43 perusahaan BUMN dan 19 anak BUMN melakukan revaluasi aset tetap. Dimana, menurut Menteri BUMN Rini Soemarno, program tersebut meningkatkan aset BUMN dari Rp. 4.577 triliun tahun 2014 menjadi Rp. 5.395 triliun pada 2015. Tercatat 10 BUMN dengan aset tetap terbesar yaitu dimiliki oleh PT. PLN, PT. Bank Mandiri, PT.

**Novi Fajrin Alifia, 2019**

*PENGARUH DEBT CONTRACT, POLITICAL COST DAN AKUISISI TERHADAP KEPUTUSAN REVALUASI ASET TETAP*

Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.upi.edu | Perpustakaan.upi.edu

BRI, PT. Pertamina, PT. BNI, PT. Taspen, PT. BTN, PT. Telkom, PT. PGN, dan PT. Pupuk Indonesia.

Pemilihan model pengukuran aset tetap sendiri menjadi salah satu hal yang harus dipertimbangkan oleh seorang manajer perusahaan. Walaupun PSAK 16 konvergensi IFRS memberikan kebebasan kepada perusahaan untuk memilih akan menggunakan model biaya atau model revaluasi. Namun, pemerintah dan presiden Indonesia lebih mendorong perusahaan untuk menggunakan model revaluasi karena nilai riil rupiah yang cenderung berubah belum lagi adanya inflasi. Penggunaan model revaluasi aset tetap juga diduga mempermudah perusahaan untuk mendapatkan aliran dana dari pihak luar karena menyajikan nilai aset perusahaan secara wajar.

Untuk membuat manajer perusahaan memilih menggunakan model revaluasi pastinya keputusan tersebut diduga didorong oleh beberapa faktor dan keadaan. Sebelumnya, telah dilakukan penelitian mengenai apa saja faktor yang mempengaruhi keputusan manajer dalam pemilihan model revaluasi sebagai model untuk pengukuran nilai aset tetap setelah pengakuan awal.

Faktor pertama yang diduga mempengaruhi keputusan revaluasi adalah *debt contract* atau kontrak hutang. Semakin tinggi kontrak hutang yang dimiliki suatu perusahaan maka, perusahaan cenderung akan melakukan revaluasi aset tetap (Latifa & Haridhi, 2016). Pada tahun 2012 revaluasi aset berhasil menyelamatkan Jiwasraya dari kebangkrutan. Pada saat itu, nilai aset Jiwasraya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan tingkat utang yang dimilikinya. Kebangkrutan Jiwasraya ditaksir mencapai Rp. 7 triliun. Kemudian, dengan persetujuan menteri BUMN mereka melakukan revaluasi aset dan berhasil menyelamatkan Jiwasraya (CNBC Indonesia, dikutip 12 Februari 2019).

Penelitian mengenai pengaruh *debt contract* terhadap revaluasi aset tetap sudah banyak diteliti sebelumnya. Proksi yang digunakan untuk mengukur *debt contract* pada penelitian sebelumnya meliputi *leverage*, penurunan arus kas operasi, dan likuiditas. Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan arus kas operasi sebagai proksi dari variabel *debt contract*.

**Novi Fajrin Alifia, 2019**

*PENGARUH DEBT CONTRACT, POLITICAL COST DAN AKUISISI TERHADAP KEPUTUSAN REVALUASI ASET TETAP*

Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.upi.edu | Perpustakaan.upi.edu

Apabila pertumbuhan arus kas operasi rendah atau mengalami penurunan dari tahun sebelumnya diduga perusahaan cenderung memilih model revaluasi aset sebagai model pengukuran aset tetap setelah pengakuan awal. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Barac & Šodan (2011) dengan judul *Motives For Asset Revaluation Policy Choice In Croatia*. Penelitian tersebut dilakukan di Croatia pada tahun 2011 dan menguji pengaruh dari variabel independen *level of indebtedness and growth option, cash flows ratios, liquidity, size* dan *Return On Equity (ROE)* terhadap variabel dependen yaitu revaluasi aset tetap. Hasil penelitian tersebut dapat membuktikan bahwa perusahaan di Croatia yang mengalami penurunan arus kas operasi umumnya akan melakukan revaluasi aset tetap sebagai upaya untuk mengurangi biaya utang dengan meningkatkan nilai aset tetap. Manajemen menggunakan nilai dari peningkatan aset tersebut sebagai jaminan kepada pihak kreditor.

Faktor kedua yang diduga berpengaruh dalam keputusan revaluasi aset tetap adalah *political cost*. Dimana biaya politik adalah biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan karena adanya tuntutan dari pihak eksternal baik itu pemerintah, buruh, lingkungan dan lain sebagainya. Perusahaan besar cenderung melakukan revaluasi aset tetap sebagai harapan untuk mengurangi biaya politik. Karena pada umumnya perusahaan besar mempunyai laba yang besar sehingga dapat menarik perhatian dari pihak eksternal. Hal tersebut mendorong perusahaan melakukan upaya untuk mengurangi laba perusahaan dengan melakukan revaluasi aset tetap. Naiknya nilai aset tetap akan berdampak pada penurunan laba perusahaan karena diduga adanya beban penyusutan dari aset tersebut. Hal tersebut didukung dengan data yang diperoleh dari (Kata Data, dikutip tahun 2019) bahwa nilai aset tetap meningkat dari tahun 2014 sebesar Rp. 4,6 kuadriliun menjadi Rp. 5 kuadriliun di tahun 2015. Sedangkan laba pada perusahaan BUMN cenderung menurun dari Rp. 159 triliun menjadi Rp. 150 triliun di tahun 2015. Sejalan dengan fenomena yang sebelumnya dipaparkan bahwa pada tahun 2015 banyak perusahaan BUMN yang melakukan revaluasi aset tetap.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan *SIZE* (Ukuran Perusahaan) sebagai proksi dari variabel *political cost*. Menurut Sukiati & Pertami (2017) *political cost*

**Novi Fajrin Alifia, 2019**

*PENGARUH DEBT CONTRACT, POLITICAL COST DAN AKUISISI TERHADAP KEPUTUSAN REVALUASI ASET TETAP*

Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.upi.edu | Perpustakaan.upi.edu

berpengaruh terhadap keputusan revaluasi aset tetap. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Aziz & Yuyetta (2017) dengan judul Analisis Faktor – Faktor yang Mendorong Perusahaan Merevaluasi Aset Tetap. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015. Hasil penelitian tersebut membuktikan dimana ukuran perusahaan merupakan salah satu indikator dalam pengukuran biaya politis. Ketika perusahaan besar melaporkan laba yang tinggi hal tersebut berdampak pada meningkatnya perhatian pihak eksternal sehingga tuntutan atas biaya politik pun tinggi. Hal tersebut menyebabkan perusahaan hendak menghindari biaya politik yang tinggi dengan cara memilih model revaluasi aset tetap sebagai metode pengukuran aset tetap.

Faktor ketiga yang diduga mempengaruhi keputusan revaluasi aset tetap adalah akuisisi. Pada tahun 2019 ini banyak perusahaan BUMN yang melakukan akuisisi sebagai cara untuk perluasan bisnis. Salah satunya adalah PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk yang berencana untuk bekerjasama dengan Sriwijaya Air dalam hal operasional dan mengakuisisi 51% saham dari Sriwijaya Air. Saat ini, PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk dan Sriwijaya Air sedang berada pada tahap penilaian aset untuk kemudian dinegosiasi berapa nilai yang akan disepakati (DetikFinance, 2019). Perusahaan yang melakukan akuisisi cenderung akan melakukan revaluasi terhadap aset tetap dengan harapan bahwa dengan melakukan revaluasi aset tetap dapat memperkuat proses akuisisi. Dengan dilakukannya akuisisi kedua belah pihak mengharapkan nilai kedua perusahaan dapat meningkat. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Iatridis & Kilirgiotis, (2012) dengan judul *Incentives For Fixed Asset Revaluation*. Penelitian ini dilakukan di United Kingdom tahun 2012. Variabel yang digunakan meliputi *Firm size, Foreign operation, Fixed Asset Intensity, Financial Leverage, Acquisitions*. Dimana hasil penelitiannya mendukung perusahaan yang melakukan akuisisi cenderung melakukan revaluasi aset tetap.

Berdasarkan pemaparan yang diuraikan sebelumnya peneliti bermaksud untuk meneliti kembali faktor yang diduga mempengaruhi keputusan revaluasi aset tetap sebagai model pengukuran aset tetap setelah pengakuan awal. Adapun variabel yang peneliti gunakan adalah *debt contract* dengan menggunakan proksi arus kas operasi.

**Novi Fajrin Alifia, 2019**

*PENGARUH DEBT CONTRACT, POLITICAL COST DAN AKUISISI TERHADAP KEPUTUSAN REVALUASI ASET TETAP*

Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.upi.edu | Perpustakaan.upi.edu

Untuk variabel kedua yaitu *political cost* dengan menggunakan proksi *size* (ukuran perusahaan). Kemudian, peneliti menggunakan variabel Akuisisi sebagai variabel ketiga. Sebagai pembeda penelitian kali ini dengan penelitian sebelumnya, peneliti akan menjadikan perusahaan BUMN sebagai subyek penelitian. Belum lagi, peneliti menemukan adanya gap dari penelitian – penelitian sebelumnya. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti kembali dan mengangkat penelitian ini dengan judul **“Pengaruh *Debt Contract*, *Political Cost*, dan Akuisisi Terhadap Keputusan Revaluasi Aset Tetap (Studi Empiris Pada Badan Usaha Milik Negara Periode 2013 - 2017”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah *Debt Contract* berpengaruh terhadap keputusan revaluasi aset tetap?
2. Apakah *Political Cost* berpengaruh terhadap keputusan revaluasi aset tetap?
3. Apakah Akuisisi berpengaruh terhadap keputusan revaluasi aset tetap?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah untuk:

1. Menguji pengaruh dari *Debt Contract* terhadap keputusan revaluasi aset tetap
2. Menguji pengaruh dari *Political Cost* terhadap keputusan revaluasi aset tetap
3. Menguji pengaruh dari Akuisisi terhadap keputusan revaluasi aset tetap

## 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang peneliti lakukan ini diuraikan sebagai berikut:

### 1.4.1 Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa referensi pembelajaran bagi mahasiswa khususnya jurusan akuntansi untuk menambah wawasan mengenai revaluasi aset tetap dan alasan yang dapat mempengaruhi keputusan manajemen untuk melakukan keputusan revaluasi aset tetap. Penelitian ini juga dapat

**Novi Fajrin Alifia, 2019**

*PENGARUH DEBT CONTRACT, POLITICAL COST DAN AKUISISI TERHADAP KEPUTUSAN REVALUASI ASET TETAP*

Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.upi.edu | Perpustakaan.upi.edu

dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai pengaruh dari *Debt Contract*, *Political Cost* dan Akuisisi terhadap keputusan revaluasi aset tetap.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dalam penelitian ini digunakan sebagai bahan referensi bagi perusahaan khususnya manajer sebagai salah satu acuan dalam melakukan keputusan revaluasi. Adapun manfaat bagi pengguna lain dapat dijadikan salah satu gambaran sebagai dasar pengambilan keputusan.